

Judul : Ada Kementerian Haji, kasus korupsi kuota jangan terulang lagi
Tanggal : Sabtu, 13 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Ada Kementerian Haji

Kasus Korupsi Kuota Jangan Terulang Lagi

ANGGOTA Komisi VIII DPR

Maman Imanulhaq mendukung pembentukan lembaga baru Kementerian Haji dan Umrah. Kementerian ini dipimpin Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan didampingi wakilnya, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Maman meminta Kementerian Haji dan Umrah tidak terjebak pada masalah klasik, yakni korupsi. Kasus korupsi kuota haji yang terjadi pada tahun 2024 harus menjadi peringatan keras dan tidak boleh terulang kembali di masa yang akan datang.

Praktik korupsi dalam penge-
lolaan haji, lanjutnya, merugikan negara dan menyakiti perasaan umat Islam yang menunaikan rukun Islam kelima dengan penuh pengorbanan. Setiap tahun jutaan umat Islam menabung selama bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci. "Ketika ada penyalahgunaan kuota atau penyimpangan anggaran, itu artinya negara gagal melindungi hak jemaah," kritik Maman.

Maman mendesak, penyeleng-
garaan ibadah haji ke depan harus semakin profesional, modern, dan berorientasi pada pelayanan jemaah. Hal ini mencakup manajemen kuota, sistem digi-
talisasi pendaftaran, transparansi biaya, penyediaan akomodasi dan transportasi yang layak, hingga penguanan layanan kesehatan.

Jemaah haji, lanjutnya, harus berangkat dengan tenang dan kembali dengan selamat. Negara berkewajiban memastikan semua aspek perjalanan dan ibadah berjalan lancar. Untuk itu dibutuhkan tata kelola yang profesional, bukan sekadar sere-
moni atau kepentingan politik semata.

Komisi VIII DPR kata Maman siap bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah dalam membangun sistem pe-
nyelenggaraan haji yang bersih. "Namun, kami akan menjadi mitra kritis agar setiap rupiah dan setiap kuota haji diguna-
kan sepenuhnya untuk kepent-
i



Maman Imanulhaq

ngan jemaah," kata Maman bebas dari praktik korupsi.

menekankan.

Dengan hadirnya Kementerian Haji dan Umrah, Maman ber-
harap kepercayaan umat terhadap penyelenggaraan haji semakin meningkat, dan Indonesia bisa menjadi contoh negara yang sukses mengelola ibadah haji secara modern, transparan, dan

Maman mengapresiasi lang-
kah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk kementerian baru yang fokus pada penyeleng-
garaan haji dan umrah. "Kehadiran kementerian ini menandai keseriusan Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayan-
an bagi jemaah," puji dia.

Senada, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko optimis, Kementerian Haji dan Umrah akan menjalankan tata kelola penyelenggaraan haji menjadi lebih baik. Otoritas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah memiliki posisi kuat, anggaran lebih jelas, dan koordi-
nasi yang lebih solid dengan kementerian/lembaga lainnya.

Menurut Singgih, perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah dan DPR dalam merespons aspirasi serta tan-
tangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan haji dan umrah selama ini.

Singgih menambahkan, pe-
rubahan kelembagaan dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah bukan sekadar perubahan nomenklatur, tapi sebuah lompatan besar dalam upaya Pemerintah dalam melakukan reformasi struktural yang fundamental. ■ TIF